# ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Abdul Rachim AF1, Zulkifli2**

*Universitas Mulawarman Samarinda1, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda2*

[Abdulrachim384@gmail.com1](mailto:Abdulrachim384@gmail.com1), [Zulkifli@uwgm.ac.id2](mailto:Zulkifli@uwgm.ac.id2)

|  |
| --- |
| **Abstract** |
| This study uses descriptive data in the form of time series, from the data analyzed proportionally, so that it can be seen the proportion of local revenue from 8 regional companies. Then the data provided by the Economic Bureau of the Regional Secretariat of East Kalimantan Province, there are 8 Regional Owned Enterprises, namely PT. Bankaltimtara, PT Migas Mandiri Pratama, PT, Melati Bahakti Satya, PT. East Kalimantan Electricity, PT Agro Kaltim Utama, PT Jamkrida East Kalimantan, PT. Bara Kaltim Prosperous, PT Forestry Silva Kaltim Sejahtera  From the eight regional companies, data on the results of regionally owned companies and the management of regional assets are separated and then a comparison is made against the Original Regional Income of the Province of East Kalimantan. amounting to Rp. 5,145,580,600,- or its contribution to Regional Original Revenue is 5.60%, then in 2016 it was Rp. 167,385,377,650,- with Rp. 4,029,384,843,890,- or 4.15% in 2017 Rp. 208.807.497.550.- with Rp. 458,751,727,470,- or 4.55% in 2018 Rp. 199,302,498,960,- with 5,802,442,683,950,- or 3.43%, in 2019 Rp. 392,979,951,610,- with 6,358,271,910,840,- or 6.17% and in 2020 Rp. 135,154,822,000,- with 4,116,573,388,000,- or 3.28% |
| **Keywords:** Pendapatan, BUMD, PAD |
| **Abstrak** |
| Penelitian ini menggunakan data deskriftif berbentuk time series, dari data tersebut dianalisis dengan proporsional, sehingga dapat diketahui proporsi pendapatan asli daerah dari 8 perusahaan daerah. Kemudian data yang diberikan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 8 (delapan) Badan usaha Milik Daerah adalah PT. Bankaltimtara, PT Migas Mandiri Pratama, PT, Melati Bahakti Satya, PT. Ketenaga Listrikan Kalimantan Timur, PT Agro Kaltim Utama, PT.Jamkrida Kalimantan Timur, PT. Bara Kaltim Sejahtera, PT Kehutanan Silva Kaltim Sejahtera  Dari delapan perusahaan daerah tersebut dicari data hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan kemudian dilakukan perbandingan terhadap Pendapatsn Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur.dengan menggunakan cara prosentase Tahun 2015 Hasil Perusahaan daerah Rp 285.307.050.00,- sedangkan Pendapatan Asli Daerah Prpinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 5.145.580.600,- atau kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 5,60 % kemudian berturt turut tahun 2016 Rp 167.385.377.650,- dengan Rp. 4.029.384.843.890,- atau 4.15 % Tahun 2017 Rp. 208.807.497.550.- dengan Rp. 458.751.727.470,- atau 4.55% Tahun 2018 Rp. 199.302.498.960,- dengan 5.802.442.683.950,- atau 3.43 %,Tahun 2019 Rp. 392.979.951.610,- dengan 6.358.271.910.840,- atau 6.17 % dan Tahun 2020 Rp. 135.154.822.000,- dengan 4.116.573.388.000,- atau 3.28 % |
| **Kata Kunci:** Pendapatan, BUMD, PAD |

**PENDAHULUAN**

Pemberlakuan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain ditegaskan Pemerintah Daerah ditekankan untuk menggali pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dengan cara mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah baik terhadap sumber daya alam, manusia,teknologi,modal maupun kelembagaan.

Pendapatan daerah tersebut untuk digunakan belajn pemerintahan, pembangan dan kemasyarakatan guna mewujudkan otonomi daerah diantaranya melalui kemampuan daerah untuk membiayaan tugas pemerintaha tersebut, maka ditetapkan sumber pendapatan daerah terdiri daeri pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, kegiatan usaha daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam upaya penghimpunan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah mendirikan Badan Usaha Daerah dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat akan keperluan barang dan jasa termasuk upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yanng diberikan kepada Pemerintah daerah yang merupakan kegiatan yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam kenyatannya belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah, justru lebih banyak suntikan dari dana Pemerintah Daerah, kondisi tersebut menjadi beban APBD, sehingga apa yang menjadi tujuan didirikannya tidak tercapai (LIPI,2010).

Dasar operasioanl pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 118 tahun 2018 tentangng rencana Bisnis, Rencana kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi. Dalam implementasinya Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal berbentuk kepada Badan Usaha Milik Daerah melalui dana Anggaran Pendapatan Daerah.

Berdasarkan observasi maka peneneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang ditetapkan judul Analisis Kontribusi Pendapatan Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan *Timur.*Berapa besar kontribusi Laba Perusahaan Daerah yang diberikan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimatan Timur. Untuk mengetahui upaya yang harus dilaksanakan guna meningkatkan kontribusi Laba Perusahaan Daerah.

**TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Badan Usaha Milik Daerah**

Badan Usaha Milik Daerah memiliki ciri sebagai berikut:

1. Pemerintah memegang ha katas segala kekayaan dan usaha
2. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham
3. Pemerintah berkewenagan menetapkan kebijakan perusahaan.
4. Sebagai sumber pendapatan daerah
5. Melayani kepentingan masyarakat dan pendapatan daerah.

Tujuan Pendiriaan Badan Usaha Milik Daerah

1. Memberi dukungan terhadap perekonomian daerah .
2. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat .
3. Memperoleh keuntungan dari usaha tersebut
4. Memberikan dan mendorong ekonomi daerah
5. Menjadi motor penggerak kegiatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Investasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2012 investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka Panjang untuk pembelian surat berharga dan dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, social, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu

Dalam struktur pendapatan daerah komponen pendapatan asli daerah satu diantaranya berasal dari bagian laba perusahaan daerah dari hasil kekayaan pentertaan modal yang dipisahkan oleh Pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu menjagi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah yakni.

1. Urgensi penyertaaan modal pemerintah daerah
2. Mnajemen dan Pengawsan Pemerintah daerah.
3. Besar hasil yang diperoleh pemerintah daerah.
4. Pentertaan modal yang dipisahakan pemerintah daerah
5. Kinerja badan usaha milik daerah.

**Model Konseptual**

Dalam Penelitian ini dirangkai pokok pikiran yang dirancang dalam kerangka berpikir dengan harappan dapat memberikan jalan bagi proses penelitian dalam menjawab dan menganalisis permasalahan sehingga mampu untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya. Kerangka penelilian tersebut didalam bentuk bagan seperti kerangka kajian dibawah ini .

Penyertaan Modal

(X1)

H1

Kontribusi Terhadap PAD (Y)

Kegiatan BUMD

(X2)

Hipotesis

Berapa besar kontribusi Laba Perusahaan Daerah yang diberikan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimatan Timur

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data deskriftif berbentuktime series, dari datatersebut diaalisis dengan proporsional, sehingga dapat diketahui proporsi pendapatan asli daerah dari 8 perusahaan daerah.

Kemudian data yang diberikan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 8 (delapan) Badan usaha Milik Daerah adalah ;

1. PT. Bankaltimtara
2. PT Migas Mandiri Pratama.
3. PT, Melati Bahakti Satya.
4. PT. Ketenaga Listrikan Kalimantan Timur.
5. PT Agro Kaltim Utama
6. PT.Jamkrida Kalimantan Timur
7. PT. Bara Kaltim Sejahtera.
8. PT. PT Kehutanan Silva Kaltim Sejahtera

Dari delapan perusahaan daerah tersebut dicari data hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan kemudian dilakukan perbandingan terhadap Pendapatsn Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur.dengan menggunakan cara prosentase

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan didapatkan data sebagai berikut :

1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM DAN KALTARA (BPD KALTIMTARA)
2. Kondisi Evaluasi

Modal dasar ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000.000,- dengan modal disetor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Rp.1.210.000.000.000,-, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Rp.490.000.000.000,-, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Rp.2.940.000.000.000,- dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara Rp.1.470.000.000.000,-. Jumlah Rp.6.110.000.000.000,- jadi masih kurang setor modal Rp.3.880.000.000.000,-. Jaringan BPD Kalimantan Timur 1452, PAD 5 tahun dengan rata-rata Rp.122.000.000.000,- serta aset Rp.25.340.000.000.000,-.

1. Pengembangan Bisnis

Adapun pengembangan bisnis yang akan dilakukan pengembangan *digital banking* dan peningkatan SDM, perlu kerjasama dengan BUMD lainnya, serta efisiensi dana operasional.

1. Rekomendasi Khusus

Adapun rekomendasi khusus adalah riset bisnis dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN), penyelesaian kredit macet, menjadikan BUMD menjadi perusahaan Tbk., serta penetapan biaya opreasional SDM, kantor dan audit tim apresial asset.

1. PD. MELATI BHAKTI SATYA
2. Kondisi Evaluasi

Modal saham tahun 1996 Rp 5 M, aset Rp 1,2 T, pesawat airvan Rp 27,5 M, hotel Pandurata Rp 64,1 M, lahan eks Puskib Rp 114,6 M, Lamin Indah, Rp 316,2 M dan peti kemas Kariangau Rp 706 M.

Pendapatan hotel pandurata 4 %, sewa parkir airvan rencana Rp. 1,250 Ribu perjam, lahan Puskib belum jalan, KKT dan PAD rerata Rp 1,5 M per tahun, hutang dana titipan tidak ada pergerakan dan 4 Anak perusahaan tidak aktif, perlu evaluasi.

1. Pengembangan Bisnis

Mengoptimalkan aset perusahaan yang ada.

1. Rekomendasi Khusus

Di buat FS agar terukur, sertifikat aset kepada PD. MBS agar mudah di pasarkan kepada investor, Dewas perlu penyegaran, lahan parkir dijadikan SPBU kerjasama dengan PT. MMP dan Mencari investor dalam pemanfaatan lahan Kerjasama BMPSTP.

1. PT. MIGAS MANDIRI PRATAMA KALTIM
2. Kondisi Evaluasi

PI 10% upaya memperbesar bisnis BUMN, Blok migas ada 83 pod-1 Rapak, Ganal, Bontang, Paser dan Wain kontrak alih kelola, Sanga-Sanga, Eastikal dan Attaka. Revenue BUMD 10% opreator 90% dari 10% bagian laba 2019 USD-9,5, 2020 USD-1,6 serta 2021 USD-46,9. Hasil RUPS laba di berikan kepada PT. MMP Rp 2 M, PAD 2019 Rp 208 M, 2021 Rp 96 M, dan piutang Rp 44 M (potensi tidak tertagih), 6,5 M (potensi tidak tertagih) dan belum RUPS.

1. Pengembangan Bisnis

Bisnis meliputi PT. MMP hilir, marine, services, LPG Pertagas Niaga, transpotasi, Pertamina Mahakam SPBU kerjasama Pertamina Depot LPG kerjasama Pertamina *City* Migas, transportasi migas, perkapalan, pipanisasi galangan kapal distribusi HSD untuk Berau Coal.

1. Rekomendasi Khusus

Bisnis teknologi tinggi dan capital perlu komptensi SDM handal, Kesiapan sdm dalam mengelola bisnis, perlu perbaikan administrasi, gaji di atur selebihnya untuk investasi dewan komisaris diperlukan penyegaran, menindak lanjuti temuan BPK dan pembagian fee dilaksanakan berdasarkan Perda.

1. PT. KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR
2. Kondisi Evaluasi

Saham PT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur sebesar 17,06% (96 M), PT. Kaltim Elektrik Power (PT. KEP) sebesar 78,50% (441 M) dan Dahlan Iskan sebesar 4,44% (25 M), rerata PAD 5 tahun terakhir 1,8 M, adanya penurunan saham perusda, piutang 7 (tujuh) perusahaan 5 (lima) Inkratch, 2 (dua) masih dalam proses hukum, RUPS 2021 belum dilakukan dan masih rendahnya PAD dibanding saham.

1. Pengembangan Bisnis

Piutang segera ditagihkan, koordinasi dengan pemegang saham, serta peningkatan bisnis koordinasi dengan mitra usaha wajib RUPS setiap tahun.

1. Rekomendasi Khusus

Ditambah saham atau saham ditarik sebesar Rp 96 M, bisnis di kelola sendiri akan terjadi delusi atau penggerusan modal, serta piutang ditagih.

1. PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH (JAMKRIDA)
2. Kondisi Evaluasi

Modal dasar 50,1 M, Pemerintah Provinsi Rp 50 M, pihak ketiga MBS Rp. 0,1 M, 16 mitra kerja, realisasi kredit UMKM PT. BPD Kaltimtara dan BPR dengan PT. Jamkrida sampai dengan November 2021 23,7 M atau 22,8% dari 100 M, peningkatan pendapatan 5,5 M, PAD selama 5 tahun sampai Tahun 2020 rerata 147 Juta aset 54,8 M (ekuitas 50,8 M, liabilitas 3,9 M, kalah bersaing dengan perusahaan sejenis yang memiliki modal lebih besar, Tahun 2020 UMKM banyak gagal bayar dan belum dilakukan RUPS Tahun 2021.

1. Pengembangan Bisnis

Sama dengan tahun sebelumnya.

1. Rekomendasi Khusus

Peningkatan kualitas SDM yang memiliki kompetensi operasional, perlu pembinaan terhadap UMK koordinasi dengan pemegang saham, ekspansi bisnis terbaru, penambahan modal dan bekerjasama dengan PT. BPD Kaltimtara.

1. PT. AGRO KALTIM UTAMA

(PAILIT)

1. PD. PERTAMBANGAN BARA KALTIM SEJAHTERA
2. Kondisi Evaluasi

Bisnis pertambangan umum, emas dan penunjang, share PAD 2007 Rp 16,6 M, 2018 Rp 19,8 M, 2019 Rp 15,8 M, 2020 Rp 13,9 M, dan 2021 belum RUPS dan pendapatan rerata Rp 14 M per tahun.

1. Pengembangan Bisnis

Jual beli komoditas tambang, usaha jasa pertambangan domsetik, market obligasi pengelolaan pelabuhan batu bara Kariangau Coal Terminal. Terjadi kenaikan kas 23,20% agar diefisienkan, belum RUPS, serta Dewas berhenti membawa kendaraan operasional.

1. Rekomendasi Khusus

Kas harus dimaksimalkan penggunaannya, neraca harus dipertanggung jawabkan dan diaudit segera RUPS, mobil operasional segera dieksekusi, penyegaran pengawas dan dibekali ilmu teknis, keuangan dan SDM setiap obyek bisnis dibuat FS, gaji diatur renbis dan bisnis plan di buat dan disetujui oleh komisaris lalu di presentasikan di depan gubernur atau gubernur membentuk tim penilai bisnis renbis dan rencana bisnis, serta sinergi antara BUMD.

1. PD. KEHUTANAN SYLVA KALTIM SEJAHTERA
2. Kondisi Evaluasi

Belum melaksanakan bisnis utama sesuai dengan Perda, menerima dividen dari kerjasama core bisnis: kayu, hasil hutan ikutan, pengolahan dan pemasaran modal awal Rp 4,95 M (2002-2003) kerjasama PT. Daysytimber, PT. Hutan Sanggam dan PT. Kideco, net profit 2012-2020 8 tahun Rp 1 M tahun rugi 0,216 M, PAD 2017-2021 5 tahun Rp 50,3 Jt rerata Rp 5,01 Jt. Perusahaan delusi, dokumen administrasi perusahaan tidak lengkap dan Rp 2,5 M belum tertagih, kerjasama dengan 1 (satu) perusahaan pailit, PAD sangat rendah saham Rp 5 M rerata Rp 50 juta/tahun cenderung binis pendapatan lain yang bukan fokus utama perusahaan.

1. Pengembangan Bisnis

Studi kelayakan, survei dan pemasaran produk, wisata kawasan dan pendanaan diharapkan dari World Bank/FCPF, serta pembagian profit APBD Kalimantan Timur.

1. Rekomendasi Khusus

Perlu diaudit khusus keuangan dan SDM, pergub tentang gaji dan renbis, membentuk badan pembina BUMD, alternatif usaha, modal, merger, kompetensi SDM atau bubarkan restruksturisasi organisasi dan peningkatan kinerja dewan komisaris, meningkatkan kinerja dan standarisasi gaji, penyusunan rencana dan pengembangan bisnis.

Rekomendasi Umum (Hasil Diskusi dengan Bidang Ekonomi, SDA dan LH TGUP3)

Adapun rekomendasi umum dari hasil diskusi dengan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup TGUP3 sebagai berikut.

1. Membuat Pergub tentang standarasisasi biaya operasional perusahaan daerah.
2. Membentuk Badan Pengawas dan Pengendalian BUMD untuk menentukan target BUMD, target pendapatan dan evaluasi aset.
3. Membentuk tim penilai renbis dan rencana operasional tahunan.
4. Menindak lanjuti temuan BPK terhadap BUMD dan usaha lainnya.
5. Restruksturisasi organisasi dan peningkatan kinerja BUMD.
6. Berdasarkan UU Ombudsman, pejabat struktural tidak boleh menjabat Dewan Pengawas.
7. Usulan perubahan Perda BUMD PT. MMP terhadap pembagian *fee*.
8. Semua perusahaan diletakkan dalam satu gedung, misalnya di Wisma Atlet Sempaja.
9. Evaluasi kinerja Dewan Pengawas terhadap kinerja BUMD.
10. Seluruh aset BUMD berada ditangan pejabat atau mantan pejabat segera dikembalikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Perekonomian sekretariat daerah provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta 8 (delapan) perusahan yang memberikan laporan pengelolaan usaha daerah maka diperoleh hasil sejak tahun 2015 sampai 2020 sebagai berikut.

Tahun 2015 Hasil Perusahaan daerah Rp 285.307.050.00,- sedangkan Pendapatan Asli Daerah Prpinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 5.145.580.600,- atau kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 5,60 % kemudian berturut turut tahun 2016 Rp 167.385.377.650,- dengan Rp. 4.029.384.843.890,- atau 4.15 % Tahun 2017 Rp. 208.807.497.550.- dengan Rp. 458.751.727.470,- atau 4.55% Tahun 2018 Rp. 199.302.498.960,- dengan 5.802.442.683.950,- atau 3.43 % Tahun 2019 Rp. 392.979.951.610,- dengan 6.358.271.910.840,- atau 6.17 % dan Tahun 2020 Rp. 135.154.822.000,- dengan 4.116.573.388.000,- atau 3.28 %.

Berdasarkan hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah, kepada 8 (delapan) perusahaan daerah dengan share tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6.17 % sedangkan yang terendah pada tahun 2020 dengan share 3.28 %. Data tersebut menunjukan share perusahaan daerah terlalu kecil terhadap pendapaan asli daerah, terlebih terhadap anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sangat merugikan pemerintah daerah karena modal yang dipisahkan pemerintah daerah terhadap BUMD cukup besar untuk membangun perusahaan daerah tersebut.

**SIMPULAN**

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah, kepada 8 delapan perusahaan daerah share tertinggi adalah pada tahun 2019 sebesar 6.17 % sedangkan yang terendah pada tahun 2020 dengan share 3.28 %. Data tersebut menunjukan share perusahaan daeerah terlalu kecil terhadap pendapaan asli daerah, terlebih terhadap anggaran pendatan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sangat merugikan pemerintah daerah karena modal yang dipisahkan pemerintah daerah cukup besar untuk membangun perusahaan daerah tersebut.

**Kutipan dan Referensi**

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2012 tntang investasi pemerintah daerah

Rachim, abdul. 2009. Barometer keuangan daerah, yogyakarta : andi offset

Rachim, abdul. 2009. Pengelolaan ketahanan pangan, samarinda : Bakti Semesta Publisher

Sampara, Lukman. 1999. Kualitas Pelayanan, Jakarta : Lembaga Administrasi Publik RI